



**ANALISIS PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI DESA
SAJIRAMEKAR KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Dibuat oleh :

Siti Nurlela
0221 18 269

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**NOVEMBER
2022**

**ANALISIS PERAN DANA DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI DESA SAJIRAMEKAR
KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., Ak., MM., CA)



Ketua Prodi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE.,
CGCAE)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be 'Arief'.

**ANALISIS PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI DESA
SAJIRAMEKAR KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022

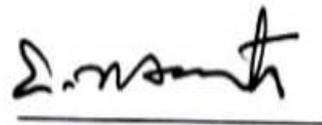
Siti Nurlela 022118269

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM, CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, M.M, M.Ak,
CFE, CFrA, CA, QIA, CGCAE, ASEAN CPA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sigit Edy Surono, Drs., MM.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurlela

NPM : 022118269

Judul Skripsi : Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Peran, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor November 2022



Siti Nurlela
0221 18 269

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

SITI NURLELA 022118269. Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dibawah bimbingan : ERNADHI SUDARMANTO dan SIGIT EDY SURONO. 2022.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Peran Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi di Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten dikarenakan anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya belum mampu melaksanakan program-program desa secara optimal, masih kurangnya bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sajira Mekar. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk megetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi desa, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat setelah adanya dana desa.

Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran atau kontribusi sesuai yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang peneliti lakukan menggunakan dua cara yaitu mengolah data dan mengklasifikasikan dan tahap selanjutnya data tersebut akan dianalisa yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten.

Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun ketahunnya mulai meningkat dilihat dari pembangunannya.

Kata Kunci: Peran Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Sajiramekar

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian dengan judul **“Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten”**. Skripsi ini menjadi salah satu prasyarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Penyusunan proposal ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua terkasih yaitu Ayahanda Jaja Sujana(alm) dan Ibunda Sri Mulyati serta keluarga besar yang sudah senantiasa mendoakan, memberikan semangat, perhatian dan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si, CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor, Ibu Enok Rusmanah, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan II Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA., CFE., CGCAE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, M.M, M.Ak, CFE, CFA, CA, QIA, CGCAE, ASEAN CPA selaku Ketua Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
7. Bapak Sigit Edy Suro, Drs., MM. Selaku Anggota Komisi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
8. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
10. Teruntuk pihak-pihak diluar Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.

11. Kepada keluarga besar Banten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendo'akan dan memotivasi untuk memberikan semangat baik material maupun finansial.
12. Kepada Bapak Lutfi Cahyadi yang telah membantu saya selama ini.
13. Kepada Bapak Kepala Desa Sajiramekar yaitu bapak Jaenudin yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di desanya.
14. Kepada Bapak Sudirja, Kartikasenliyani serta pegawai desa semuanya yang telah membantu dalam proses penelitian selama di Desa Sajiramekar.
15. Kakak-kakakku yang tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat moral maupun finansial.
16. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi angkatan 2018 yang telah menemani saya.
17. Muhamad Akbar Fauzi yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan semangat dan do'a.
18. Kepada teman-teman 7D serta para sahabat saya chingudel yaitu Reni, Euis, Nadia, Neli, Chaerunissa dan sahabat resenly yang telah memberikan support.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian proposal penelitian ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan saran dan masukan untuk melengkapi penulisan proposal penelitian ini.

Bogor, November 2022



Siti Nurlela
022118269

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Peran	7
2.2. Pengertian Desa	7
2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa	8
2.2.2. Dasar-Dasar Pembangunan Desa	9
2.3. Dana Desa	10
2.3.1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	11
2.3.2. Tujuan Dana Desa	12
2.4. Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi	14
2.4.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi	14
2.4.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	16
2.4.3. Aspek-Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi	16
2.4.4. Strategi Pemberdayaan	18
2.4.5. Perencanaan Pembangunan Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat	18
2.4.6. Perencanaan Program	21
2.4.7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
2.5. Penelitian Terdahulu	22

2.6. Kerangka Pemikiran	30
BAB III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	31
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6 Metode Pengumpulan Data	33
3.7 Metode Pengelolaan/Analisis Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Desa Sajiramekar	35
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sajiramekar	35
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Sajiramekar	36
4.1.3 Visi dan Misi Desa Sajiramekar.....	37
4.1.4 Kondisi Geografis Desa Sajiramekar	38
4.1.5 Kondisi Demografis Desa Sajiramekar	38
4.1.6 Profil Informan.....	43
4.2 Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	44
4.3 Analisis Data	44
4.3.1 Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sajiramekar Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa.....	45
4.3.2 Upaya Pemerintahan Desa Sajiramekar Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	48
4.3.3 Partisipasi dan Respon Masyarakat Setelah Adanya Program Dana Desa.....	53
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Penelitian	58
4.4.1 Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa.....	58
4.4.2 Upaya Pemerintah Desa Sajiramekar Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	62
4.4.3 Partisipasi Masyarakat Desa Sajiramekar Dengan Adanya Program Dana Desa.....	64
4.4.4 Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAH HIDUP	73
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa di Desa Sajiramekar Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Sajiramekar	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	39
Tabel 4.4 Fasilitas Keagamaan	39
Tabel 4.5 Tingkat Kesehatan	40
Tabel 4.6 Prasarana Kesehatan	40
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan	41
Tabel 4.8 Prasarana Pendidikan	41
Tabel 4.9 Mata Pencaharian.....	42
Tabel 4.10 Sumber Penghasilan.....	42
Tabel 4.11 Prasarana Umum Desa Sajiramekar.....	43
Tabel 4.12 Profil Informan.....	43
Tabel 4.13 Tafairan Nilai	44
Tabel 4.14 Kriteria Penilaian Berdasarkan Angka.....	44
Tabel 4.15 Hasil Peran Dana Desa.....	45
Tabel 4.16 Hasil Upaya Pemerintah Desa.....	48
Tabel 4.17 Partisipasi dan Respon Masyarakat	53
Tabel 4.18 Tingkat Kesesuaian.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Transfer APBN.....	11
Gambar 2.2 Diagram Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sajiramekar	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memakai suatu sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah di mulai sejak tahun 1999 yang diharapkan bisa membantu serta mempermudah dalam berbagai suatu urusan penyelenggaraan negara. Dalam perkembangan di Indonesia, pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang ‘ Penyelenggaraan Otonomi daerah, Peraturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ‘ merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015). Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat

pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.

3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Tabel 1.1
Dana Desa Yang Diterima Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp 578.925.000
2.	2020	Rp 730.085.000
3.	2021	Rp. 750.799.500
	Jumlah	Rp 2.059.809.500

Sumber: APBD Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2019-2021.

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa Sajiramekar yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program bantuan langsung tunai, penanggulangan bencana alam, pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong.

Sedangkan pada tahun 2020 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana olahraga, pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan pengadaan perpustakaan desa. Setelah dua tahun berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa yang bertambah tingkat kemiskinan menurun dan diharapkan agar dapat membantu masyarakat

dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa Sajiramekar dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karna pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Pada data yang sudah diperoleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka indikator masalahnya yaitu anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya belum mampu melaksanakannya program-program desa secara optimal, masih kurangnya bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sajira Mekar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan indikator masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Sajira Mekar sebelum dan sesudah adanya dana desa?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sajira Mekar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa?
3. Bagaimana partisipasi dan respon masyarakat Desa Sajira Mekar dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, informasi tersebut nantinya akan dianalisis dan akan digunakan untuk menyusun skripsi dan memberikan kesimpulan mengenai "Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten".

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa.

2. Menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Desa Sajira Mekar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dari dana desa.
3. Untuk mengetahui partisipasi dan respon masyarakat Desa Sajira Mekar dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penyusunan penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemahaman khususnya kepada masyarakat sekitar akan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terlebih dengan adanya program dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari pemerintah melalui APBN, dan bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

1.4.2. Kegunaan Teoritis/ Akademik

Diharapkan dari penyusunan penelitian ini, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik serta menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian sosiologi. Selain itu juga diharapkan mampu menambah khasanah pembelajaran dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

2.2 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan didalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa, selain itu desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. Meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh

BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014)

Sedangkan menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo). Desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat didalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum, masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara.

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Permendes Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya.

Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokarasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan

menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.

2.2.2 Dasar-dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil- hasil pembangunan.

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat berkaitan dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha- usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.

2.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

UU No. 60 Tahun 2014 yang berisi tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, sumber dana desa (Desa 2014) berasal dari :

1. Pendapatan Asli dari Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja dilakukan secara transfer ke daerah/desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang telah diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang

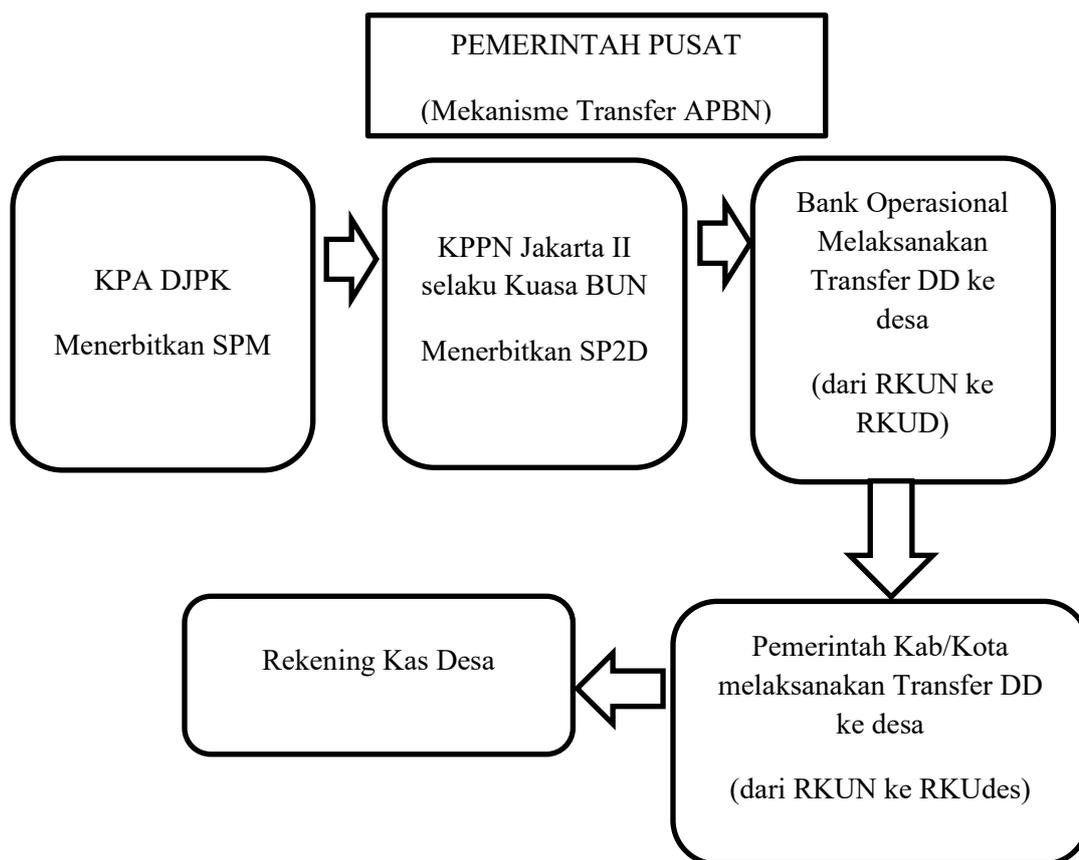
diterima Kabupaten/Kota dalam APBN setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

5. Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak terikat oleh pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat di gambar berikut.



Gambar 2.1 Mekanisme Transfer APBN

Sumber : Mekanisme Transfer APBN Berdasar Juknis Pencairan Dana Desa

Mekanisme pencairan dana desa dan penyaluran Alokasi Dana Desa :

1. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.3.2 Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat 4 penggunaan dana desa diatur sebagai program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dan program sektor prioritas lainnya sekitar 32% (tiga puluh persen). Dari total 100% (seratus persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% dari Dana Desa untuk memenuhi sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomi, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2 berupa :

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup.
Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan.
 - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan.
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan.
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan.
 - b. Melakukan pemutakhiran dan kemiskinan.
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja.
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
4. Prioritas Dana Desa untuk peningkatan pelayanan publik.
Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

Menurut Permendes No 21 tahun 2020 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (*empowerment*) atau penguatan (*stengening*). Wordbank dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan kesempatan atau kemampuan kepada kelompok masyarakat (kurang mampu) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan dll.)

Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain adalah pemberdayaan memampukan memandirikan masyarakat. Subejo dan Narimo dalam Mardikanto dan Soebiato mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang di miliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Dari beberapa teori diatas maka dapat di pahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang disengaja sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri perangkap kemiskinan.

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimalisasi daya yang di miliki atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam pengertian “kemampuan atau

keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang banyak dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato dalam soleh (2014) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu disebutnya Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

1. Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu di landasi pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia sehingga dalam upaya bina manusia semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Kapasitas pengembangan meliputi: individu, pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).
2. Bina Usaha, menjadi suatu usaha penting dalam setiap pemberdayaan sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
3. Bina Lingkungan, sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan isu lingkungan menjadi sangat penting.

Menurut Wahjudi Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewedahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dalam hal berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukannya. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

Menurut Mardikanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)
Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Perbaikan Usaha (*Better Business*)
Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada disekitarnya.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)
Perbaikan bisnis diharapkan dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga termasuk masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)
Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat dilihat dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli.
6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)
Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.4.3 Aspek dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

A. Apek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek :

1. *Enabling*
Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya.pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya denga mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*

Yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paing bawah yang keberdayaannya sangat kurang.

3. *Protecting*

Yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

B. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari unsur peningkatan yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultur dan politis. Menurut Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Kebebasan mobilitas
Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya sendiri, individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat kepuasan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ingin membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar
Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dan komoditas keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan unjuk rasa.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

2.4.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas

dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matras pemberdayaan yaitu :

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individual melalui bimbingan, konsling. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan berpusat pada tugas.

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Aras Makro

Pendekatan ini sering disebut sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut Isnawan dalam Mardikanto, totok dan Soebinto tahun 2017 menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

- a. Pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok.
- c. Penumpukan modal masyarakat (swasta).
- d. Pengembangan usaha produktif.
- e. Penyediaan informasi tepat guna.

2.4.5 Perencanaan Pembangunan Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah bagian dari proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan

masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan, secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sektor dan kelembagaan dalam rangka.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Strategis

Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kualitas dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.

b. Demokratis dan partisipasi

Perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntebel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup :

- Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan.
- Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
- Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- Kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- Perlibatan masih dalam sosialisasi perencanaan.
- Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan strategi dan kebijakan, prioritas program.

c. Politik

Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang.

d. *Bottom-up Planning*

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat :

- Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat kesesuaian dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih.
- Memperhatikan hasil proses musyawarah perencanaan pembangunan dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.
- Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.

e. *Top-down Planning*

Perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan :

- Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arahan dan kebijakan ditingkat daerah kabupaten/kota.
- Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), pemenuhan air bersih, sanitasi dan infrastruktur dasar.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi :

1. Masyarakat Desa.
2. Pemerintah Desa.
3. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Tenaga pendamping profesional dan,
5. Pihak ketiga.

Adapun tujuan dibuatnya pedoman umum pembangunan masyarakat desa adalah untuk :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.
2. Mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa.
3. Memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs desa.
4. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

5. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Mengonolidasikan kepentingan bersama.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan
8. Meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

2.4.6 Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau instansi yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.

Perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan sosial pada hakikatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian kegiatan uang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, kelompok seta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan

2.4.7 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Perekonomian rakyat
Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat
Usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.
- c. Perubahan struktural
Perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat.
Langkah-langkah proses perubahan struktural:
 - 1) Pengolahan Sumber Daya Manusia (SDM).

- 2) Penguatan kelembagaan.
- 3) Penguasaan teknologi.
- 4) Pemberdayaan sumber daya manusia

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Soleman Rendra Bili, Dekki Umamur Ra'is (2017) Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Independen : Dampak Dana Desa Dependen : Pemberdayaan Masyarakat	Dampak dana desa : - Kapasitas - Sarana perekonomian - Partisipasi - Akuntabilitas Pemberdayaan masyarakat : - Sumber daya alam - Sumber daya manusia - Kapasitas aparatur karyawan	Analisis Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1. Dana desa sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat terbukti dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. 2. Pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa tersebut dengan cara transparansi terhadap masyarakat melalui musyawarah bareng desa dengan menghasilkan keputusan bersama dan apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dengan

					melakukan pelatihan seperti pembuatan budidaya jamur, pembuatan RAB
2	M Indra Maulana (2018) Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)	Independen : Peran Dana Desa Dependen : Memberdayakan masyarakat	Peran dana desa : - Partisipasi - Akuntabilitas - Keterlibatan - Pengelolaan dana desa Pemberdayaan masyarakat : - Masyarakat - Komoditas besar/kecil - Kejujuran - Kekompakan	Analisis Kualitatif	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dana desa sangat berpengaruh positif dalam pemberdayaan masyarakat.
3	Icha Shintia Dewi (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)	Independen : Pengelolaan dana desa Dependen : Kepuasan Masyarakat	Pengelolaan dana desa : - Transpransi - Akuntabilitas - Partisipasi Kepuasan : - Kualitas yang diberikan sesuai dengai yang dijanjikan - Pelayanan yang baik memberikan kepuasan.	Analisis Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang

					<p>meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek.</p> <p>Pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan disetiap dusun untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas dan pemberdayaa masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan.</p>
4	Hijra (2017) Analisis Peran Dana Desa Terhadap Pengembangan Desa Picara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.	<p>Independen : Peran Dana Desa</p> <p>Dependen : Pengembangan Desa</p>	<p>Pengembangan desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas aparatur dan jangkauan layanan publik - Kekayaan dan keuangan desa - Sarana perekonomian desa 	Analisis Kualitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengembangan dana desa sesudah adanya program desa menjadi lebih baik lagi, upaya meningkatkan pengembangan desa menjadi lebih positif.
5	Torkis Harahap (2019) Pengelolaan Dana Desa	<p>Independen : Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Dependen :</p>	<p>Pengelolaan dana desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian sumber daya 	Analisis Kualitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dengan adanya dana desa

	<p>Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.</p>	<p>Kesejahteraan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas <p>Kesejahteraan masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasa aman - Kebebasan - Kesejahteraan - Jati diri - Keadilan sosial - Keadilan ekonomi - Keadilan demokratis 	<p>masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa payaombur, proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasana</p>
--	---	---------------------------------	---	--

					serta kualitas sumber daya manusia proses merencanakan, melaksanakan dan mengavaluisendi ri kegiatan pembangunan desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.
--	--	--	--	--	---

1. Peneliti : Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is
 Judul : Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
 Tahun : 2017
 Universitas : Universitas Tribhuwana Tungadewi
- Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan:
- Variabel yang digunakan
 Variabel Dependen: pemberdayaan masyarakat.
 - Metode analisis data yang digunakan peneliti sama seperti yang akan saya gunakan yaitu analisis kualitatif.
 - Mencari data dengan observasi, wawancara dan datang langsung ke desa tersebut.
- Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:
- Penelitian ini lebih memfokuskan kepada dampak dana desanya sedangkan, penelitian yang akan saya lakukan memfokuskan pada peran dana desanya.
 - Desa yang akan diteliti berbeda.
- Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak dana desa dalam memberdayakan masyarakat sangat berpengaruh positif dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Peneliti : M Indra Maulana
 Judul :Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)
- Tahun : 2018
 Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan:
- Variabel yang digunakan
 Variabel Independen: Peran Dana Desa

- Metode analisis data yang digunakan peneliti sama seperti yang akan saya gunakan yaitu analisis kualitatif.
- Metode pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:

- Variabel dependennya adalah pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi berbasis islam sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan memiliki variabel dependen yaitu pemberdayaan masyarakat.
- Desa yang diteliti berbeda dengan desa yang akan saya teliti.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dana desa sangat berpengaruh positif dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Peneliti : Icha Shintia Dewi
 Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)
 Tahun : 2019
 Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan:

- Metode yang digunakan menggunakan analisis kualitatif.
- Sumber data menggunakan data primer dan sekunder.
- Menggunakan hasil wawancara, observasi dan survei langsung kelapangan untuk menghasilkan data.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:

- Penelitian ini lebih mendalami tentang pengelolaan data bagi kepuasan masyarakat sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih mendalami peran dana desa bagi pemberdayaan masyarakatnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek. Pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan disetiap dusun untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas dan pemberdayaa masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan.

4. Peneliti : Hijra
 Judul : Analisis Peran Dana Desa Terhadap Pengembangan Desa Picara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Tahun : 2017

Universitas : Universitas Muhammadiyah Palopo

Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan:

- Variabel yang digunakan Variabel Independen: Peran Dana Desa
- Metode yang digunakan analisis kualitatif.
- Pengembangan desa sesudah dan sebelum adanya dana desa.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:

- Menggunakan variabel dependen : pengembangan sedangkan penelitian yang akan saya gunakan yaitu pemberdayaan masyarakat dari perspektif ekonomi.
- Desa yang akan diteliti.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengembangan dana desa sesudah adanya program desa menjadi lebih baik lagi, upaya meningkatkan pengembangan desa menjadi lebih positif.

5. Peneliti : Torkis Harahap

Judul :Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Tahun : 2019

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

- Menggunakan variabel dependen yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- Menggunakan metode analisis kualitatif.
- Mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi.

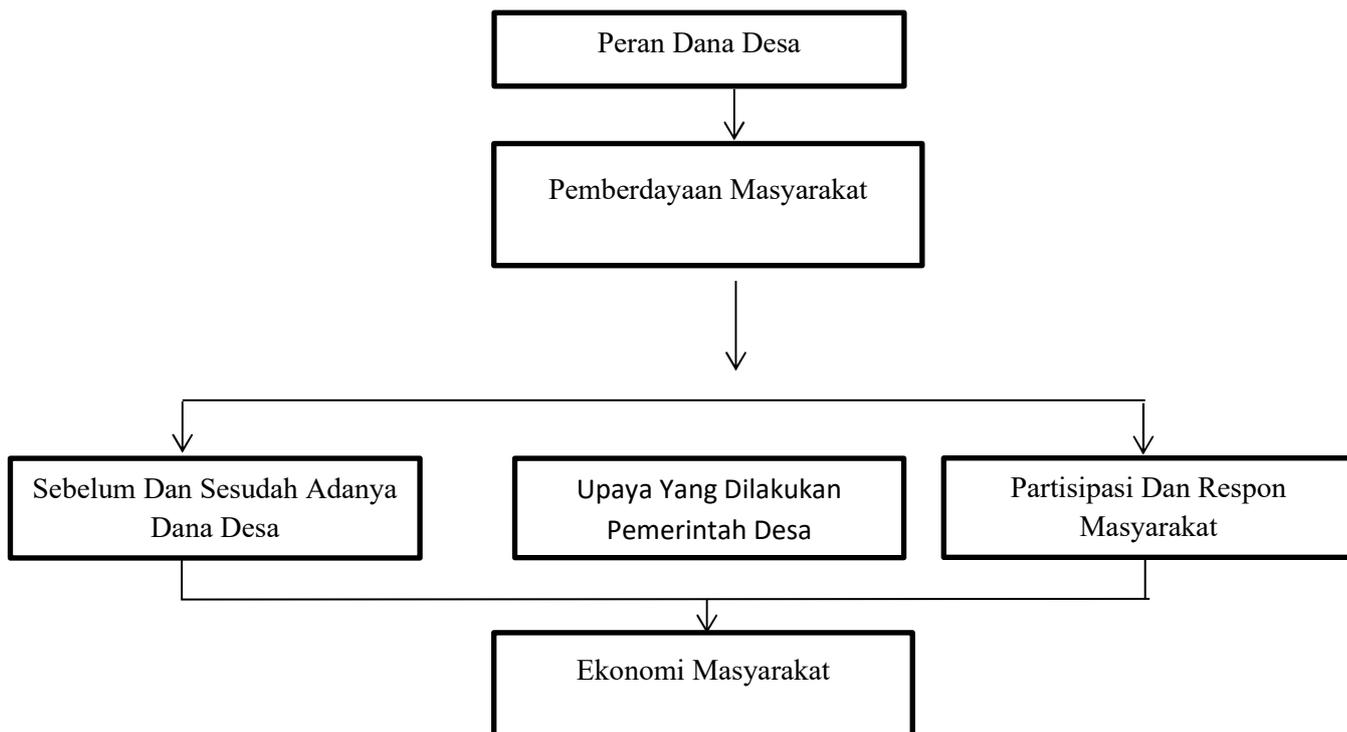
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan :

- Menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan dana desa.
- Desa yang akan diteliti sangatlah berbeda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa payaombur, proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan pada gilirannya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasana serta kualitas sumber daya manusia proses merencanakan, melaksanakan dan mengavaluasisendiri kegiatan pembangunan desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari peneliti. Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui proses peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, ingin mengetahui peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa.



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran ilmiah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian survei lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan survei, observasi, wawancara, dokumentasi.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini dilakukan di Desa Sajira Mekar peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimanapun peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Unit analisis berfokus terhadap perangkat desa di kantor Desa Sajira Mekar. Lokasi yang dilakukan di Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan peneliti akan lebih banyak mengandung deskripsi yang merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diartikan sebagai petunjuk yang berfungsi untuk menjelaskan kepada peneliti yang berhubungan dengan pengungkapan variabel yang lebih konkret. Definisi operasional variabel ini sangatlah penting dan diperlukan untuk setiap variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai upaya membatasi permasalahan apa saja yang akan diteliti.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel ‘Analisis Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten’

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Peran Dana Desa	Keseluruhan kegiatan yang meliputi partisipasi, akuntabilitas, keterlibatan dan pengelolaan dana desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian prosedur dalam penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa. 3. Kejujuran dan keterbukaan dalam informasi. 4. Keterlibatan dalam pengelolaan dana desa. 5. Keterlibatan dalam proses penatausahaan dana desa 	Ordinal
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Komoditas besar/ kecil. 3. Kejujuran 4. Kekompakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Keikutsertaan masyarakat desa untuk mendukung keberhasilan suatu desa. 3. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal. 	Ordinal

Sumber Indikator : Diperoleh dari Skripsi M Indra Maulana dan Icha Shintia Dewi tahun 2019

3.5 Metode Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan penelitian yang mengambil sampel menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam penelitian ini responden yang ditujukan kepada individu yang mengetahui dan paham terhadap peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yang terdiri :

1. Kepala desa
2. Perangkat desa

3. Badan permusyawaratan desa
4. Kepala dusun
5. Ketua Rumah Tangga (RT)
6. Masyarakat desa Sajira

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu, sampel dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini melakukan observasi langsung pada Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara informan dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan, sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden kemudian responden menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian.

2. Metode pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Metode pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut :

- a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembangunan infrastruktur desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dari aparat desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti kepala desa dan kaur pembangunan.

3.7 Metode Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka data dapat diadakan pengolahan data yang disebut analisis data. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian maka langkah selanjutnya menganalisis dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisis data yaitu mengikuti alur yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu :

1. Mereduksi Data

Yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data yang ada sedemikian rupa kemudian ditentukan pola yang dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan pola tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mencari kelengkapan data yang belum diperoleh.

2. Penyajian Data

Yaitu data yang telah disusun dalam pola selanjutnya akan dianalisis terus-menerus bersamaan dengan perolehan data baru yang berkaitan dengan permasalahan sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alus sebab akibat atau proposisi. Simpulan dilakukan melalui pelukisan dan verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sajira Mekar

4.1.1 Sejarah singkat Desa Sajira Mekar

Desa Sajiramekar merupakan hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Sajira berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 938/PM/-120/SK/PEM/1978 pada tanggal 15 Juni 1978, tentang Pemekaran Desa di lingkungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka pada waktu itu dibentuklah pemekaran desa.

Desa Sajiramekar merupakan penyangga ibukota kecamatan karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sajira yang jaraknya hanya beberapa meter saja ke ibukota kecamatan sehingga informasi dan sektor Pemerintahpun akan semakin cepat diterima dan ketahui keberadaannya. Oleh karena itu potensi alam pertanian Desa Sajiramekar cukup subur sehingga sebagian besar masyarakat atau penduduk Desa Sajiramekar bermata pencaharian petani, baik itu pertanian tanaman pangan atau petani disektor perkebunan karet rakyat atau hutan rakyat.

Sektor lain yang cukup terkenal dari Desa Sajiramekar adalah dibidang objek wisata ziarah yaitu “Keramat Panembahan Prabu Dalem Wong Sagati” sehingga para penziarah lokal ataupun pendatang dari luar kota bahkan sampai ke negeri ziran(tetangga) Malaysia dan Brunei Darusalam.

Dari beberapa sektot potensi yang ada di Desa Sajiramekar sudah jelas-jelas membantu kepada jalannya roda pemerintahan dan organisasi yang ada di lingkungan pemerintah Desa Sajiramekar pada Khususnya sebagai sentra pelayanan kepada masyarakat.

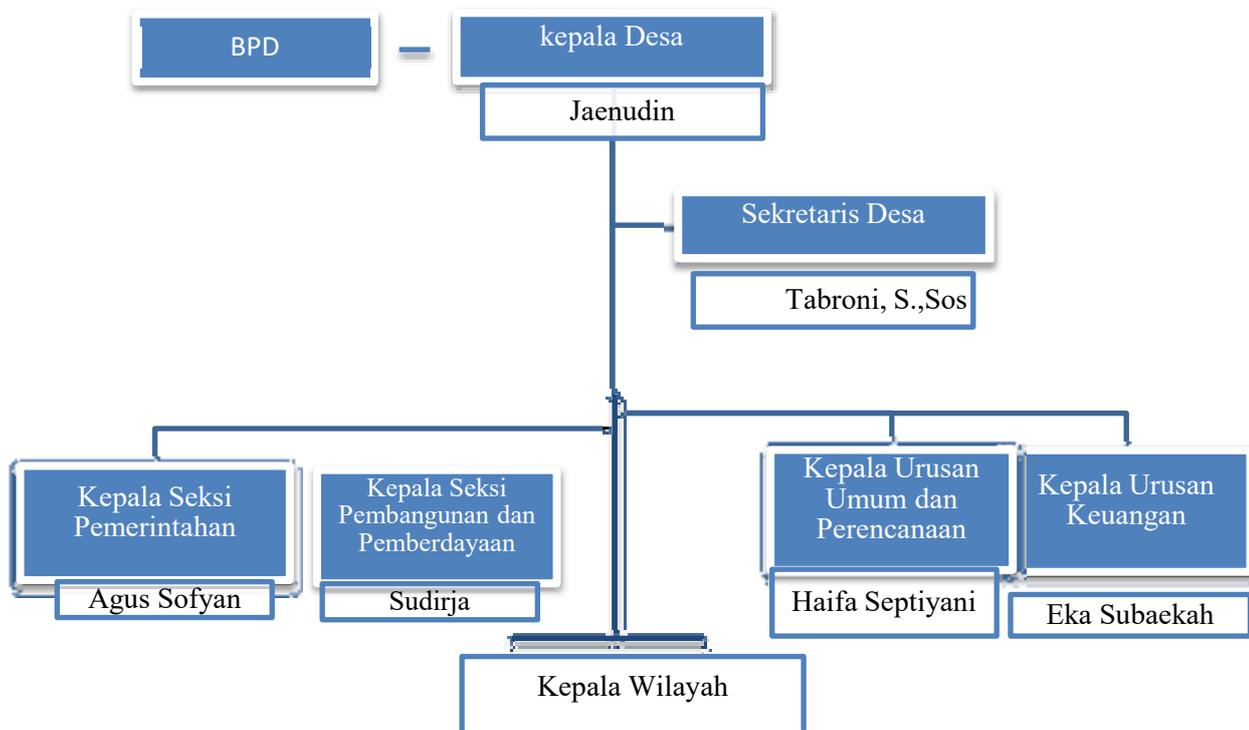
Dari uraian sejarah Desa Sajiramekar, sejak tahun 1978 sudah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan kepala desa, berikutnya ini adalah rekapitulasi secara berturut-turut :

- Kepala Desa Sajiramekar pertama adalah Jujun Sujana pada tahun 1978 sampai 1983.
- Pada tahun 1983 sampai 1991 Kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Awawi.
- Pada tahun 1991 sampai 1999 Kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Ruslan Abdulgani.
- Pada tahun 1999 sampai 2007 Kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Sarmani Saad.
- Pada tahun 2007 sampai 2013 Kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Memet Selamat.
- Pada tahun 2014 sampai 2015 Kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Tabroni, S.,Sos.

- Pada tahun 2015 sampai 2021 kepala Desa Sajiramekar dijabat oleh Jaenudin.

4.1.2 Struktur Organisasi Desa Sajiramekar

Adapun struktur organisasi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sajiramekar

Sumber : Struktur Organisasi Desa Sajiramekar

Dari gambar diatas maka dapat diuraikan tugas dari masing-masing unit, sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Kaur Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti surat menyurat, arsip, penataan administrasi perangkat desa, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

5. Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
6. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan dan pengelolaan wilayah dan pendataan pengelolaan profil desa.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melakukan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosial dan karang taruna.

4.1.3 Visi dan Misi Desa Sajiramekar

Visi Desa Sajiramekar

“Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sajiramekar yang Transparan dalam rangka Desa yang Mandiri” Visi tersebut mengarah pada pencapaian tujuan desa harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberlanjutan yang ingin dicapai.

Misi Desa Sajiramekar

1. Menyelenggarakan bidang pemerintahan Desa Sajiramekar yang transparan dengan penyelenggaraan secara terbuka sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) terhadap masyarakat Desa Sajiramekar sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), berhasil guna (efektif) dan tepat sasaran (efisien).
2. Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan suatu upaya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Sajiramekar terutama dalam pelayanan dasar masyarakat yaitu : pelayanan dibidang kesehatan dengan menyediakan mobil gratis untuk merujuk atau membawa pasien ke rumah sakit, pelayanan dibidang pendidikan yaitu dengan memberikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Mempercepat pemerintahan bidang pemerintah infrastruktur.
4. Menyelenggarakan bidang pembinaan masyarakat dengan salah satu upaya pemerintah Desa Sajiramekar untuk pro aktif dalam memberikan pembinaan baik bidang penyuluhan hukum, kesadaran untuk melakukan ketertiban keindahan dan keamanan serta menumbuhkembangkan kembali budaya gotong royong.
5. Menyelenggarakan bidang pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, Tim Penggerak PKK Desa, Kader Posyandu, BUMDes, Karang Taruna

sehingga semua pemangku kepentingan di tingkat desa dapat memahami dan meningkatkan pengetahuannya.

4.1.4 Kondisi Geografis Desa Sajiramekar

Desa Sajiramekar merupakan suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang meliputi beberapa kampung yaitu Kp. Sajira Timur, Kp. Cidengdong, Kp. Babakan, Kp. Hegarmanah, Kp. Oko, Kp. Hirung. Adapun jarak orbitasi atau lintas jarak yang dilalui untuk mencapai pusat pemerintahan sebagai berikut :

- Ibu Kota Kecamatan 1 Km.
- Ibu Kota Kabupaten 2 Km.
- Ibu Kota Provinsi 66 Km.
- Ibu Kota Negara 96 Km.

Desa Sajiramekar terbagi dalam 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 502,99 Ha, yang terdiri dari beberapa jenis pemanfaatannya seperti lahan untuk pemukiman hanya 29%, lahan pertanian 70% dan 1% berupa lahan budidaya perikanan.

Tabel 4.1

Luas wilayah Desa Sajiramekar menurut penggunaan

No	Wilayah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	145 Ha
2.	Pertanian	166 Ha
3.	Persawahan	180 Ha
4.	Fasilitas Umum atau Pemakaman Umum	6 Ha
5.	Tanah Desa atau Bengkok	5Ha

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar.

Desa Sajiramekar terletak disebelah barat wilayah Kecamatan Sajira yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 155 meter di atas permukaan laut, Desa Sajiramekar memiliki curah hujan rata-rata 272 dengan ketinggian 112 mdpl dan koordinat bujur 106.3707 koordinat lintang -6.518138. Adapun batas-batas wilayah Desa Sajiramekar yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Haurgajrug dan Malangsari Kecamatan Cipanas.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sajiramekar (Sungai Ciberang) Kecamatan Sajira.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Guradog (Jl. Raya Cipanas) Kecamatan Curugbitung.

4.1.5 Keadaan Demografis Desa Sajiramekar

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Terlihat dari data demografis Desa Sajiramekar dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.012 dengan jumlah Jiwa 3.132. berikut tabel penduduk di Desa Sajiramekar

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Sajiramekar

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	1.580 Orang
2.	Perempuan	1.552 Orang
	Total	3.132 Orang

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Sajiramekar berjumlah 1.012 KK dengan jumlah 3.132 Jiwa yang terdiri dari 1.580 orang laki-laki dan 1.552 perempuan. Dapat diartikan bahwa penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki.

b. Penduduk Desa Sajiramekar Berdasarkan Agama

Penduduk di Desa Sajiramekar mayoritas memeluk agama Islam berjumlah 3.132 Orang.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Agama Islam

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	3.132 Orang

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar

Fasilitas keagamaan yang dimiliki desa Sajiramekar sebagai sarana atau tempat peribadatan dan juga sebagai tempat pengkajian ilmu-ilmu keagamaan yang dimana hal ini sangat penting keberadaannya dalam pendidikan kerohanian dan akhlak. Desa Sajiramekar hanya memiliki Masjid , Musholla, Masjid Taklim dan Taman Pendidikan Al-Quran atau Pondok Pesantren.

Tabel 4.4

Fasiitas Keagamaan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Musholla	5 buah
3.	Masjid Taklim	4 buah
4.	Taman Pendidikan Al-Quran atau Pondok Pesantren	5 buah
	Jumlah	16 Buah

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kesehatan Masyarakat Desa Sajiramekar

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah Human Development Index (HDI) atau indeks

pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita)

Tabel 4.5
Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Sajiramekar

No	Indikator	Jumlah
1.	Angka Kematian Bayi	6 Orang
2.	Angka Kematian Ibu	0 Orang
3.	Angka Harapan Hidup (%)	94
4.	Persalinan Oleh Tenaga Medis (%)	95

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar

Tabel diatas menunjukkan bahwa meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Desa Sajiramekar. Hal ini ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang menjelaskan tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kurang cukup gizi atau angka kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat Desa Sajiramekar dalam penanganan bayi sudah tidak menggunakan tabib atau dukun bayi dikarenakan akses jalan menuju puskesmas semakin mudah serta tersedianya bidan dan dokter piket sebagai penyelamat angka harapan hidup yang didorong oleh desa. Kemajuan dalam informasi dan mudahnya dalam akses internet cukup mudah dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai kesehatan.

Tabel 4.6
Prasarana Kesehatan

No	Failitas	Jumlah
1.	Posyandu	4
2.	MCK	8

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sajiramekar

Pendidikan adalah isu yang sangat penting pada saat sekarang hal ini untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia dalam pemerintah. Hasil pemerintahan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan indeks pendidikan yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan Desa Sajiramekar terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sajiramekar

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
----	------------	---------------

1.	Putus Sekolah	10
2.	Buta Huruf	9
3.	Tamat TK	60
4.	Tamat SD/Sederajat	259
5.	Tamat SLTP/Sederajat	723
6.	Tamat SLTA/Sederajat	476
7.	Tamat Diploma	9
8.	Tamat S1	23
9.	Tamat S2	10
	Total	1.579

Pendidikan masyarakat yang kian meningkat dapat diartikan bahwa pola pikir masyarakat mulai terbuka dan memahami begitu pentingnya pendidikan, tetapi masih banyak

juga masyarakat yang tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak mampu dalam hal biaya. Bahkan banyak anak yang telah lulus jenjang SLTA lebih memilih berhenti untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Tabel 4.8
Prasarana Pendidikan

No	Gedung	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	2
3.	SD/MI	2
4.	SMP	1
5.	SMA/SMK	2
6.	Perpustakaan Desa	1
	Total	9 Gedung

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar 2021

Fasilitas yang sangat ditunggu oleh masyarakat desa adalah perguruan tinggi , dimana masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah sekitar 97,5 km.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten

Tabel 4.9
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	27 Orang
2.	TNI/Polri	3 Orang
3.	Swasta/Karyawan	85 Orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	75 Orang
5.	Petani	690 Orang

6.	Tukang	80 Orang
7.	Buruh Tani	902 Orang
8.	Pensiuanna	6 Orang
9.	Peternak	4 Orang
10.	Pengrajin	3 Orang
	Total	1.875 Orang

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya selalu berbeda yang biasanya menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

Mata pencaharian masyarakat Desa Sajiramekar cukup beragam. Akan tetapi, jenis pekerjaan buruh dan petani. yang mendominasi atau paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Sajiramekar. Dengan berdasarkan jumlah ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Sajiramekar adalah termasuk masyarakat pertanian masyarakat petani di sini yakni masyarakat yang mayoritas atau kebanyakan bekerja sebagai petani. Desa Sajiramekar memiliki struktur tanah yang tepat untuk bercocok tanam komoditi yang mayoritas masyarakat adalah padi sedangkan beberapa lainnya berprofesi sebagai pedagang, PNS, pekerja honor dan buruh tani.

Penghasilan mayoritas petani dalam satu bulan mencapai Rp. 2.500.000 pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu sebagai petani yang hanya mengandalkan cuaca dan lahan, tidak jarang petani mengalami kegagalan panen karena cuaca dan hama yang tidak menentu.

Tabel 4.10

Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Sajiramekar

No	Sumber Penghasilan	Jumlah
1.	Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1.580
2.	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)	10
3.	Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	350

Sumber : Kantor Desa Sajiramekar

Tabel 4.11

Prasarana Umum Desa Sajiramekar

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Tempat Olahraga	1
2.	Kesenian dan budaya	4
3.	Jalan	6 Km
4.	Jembatan	1

Sumber : Sumber Daya Pembangunan Desa

4.1.6 Profil Informan

Dari penelitian ini peneliti telah mempertimbangkan orang yang akan menjadi informan yaitu orang yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Dengan ini penulis menggunakan media wawancara, dokumentasi dan juga observasi ke Desa Sajiramekar.

Tabel 4.12
Profil Informan

No	Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan	Tempat Wawancara
1.	Jaenudin	Kepala Desa	SLTA	Ruang Kerja Kepala Desa
2.	Tabroni, S.,Sos	Sekretaris Desa	S1	Ruang Kerja Sekretaris Desa
3.	Haifa Septiyani	Kepala Urusan Umum	SLTA	Ruang Kerja Kaur Umum
4.	Agus Sofyan	Kepala seksi Bidang Pemerintahan	SLTA	Ruang Kerja Kasi Pemerintahan
5.	Sudirja, S.,Kom	Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan	S1	Ruang Kerja Kasi Pemberdayaan
6.	Ustad Ume	Tokoh Masyarakat	SLTA	Kp. Hegarmanah (Kediaman Bapak Ustad Ume)
7.	Muhamad	Masyarakat	SI	Kantor Desa Sajiramekar
8.	Komarudin	Masyarakat	SLTA	Kp. Oko (Kediaman Bapak Komarudin)

Sumber :Dokumen Profil Desa Sajiramekar

4.2 Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran dana desa sangatlah penting bagi masyarakat desa Sajiramekar, dana desa sendiri memberikan makna yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sajiramekar dibuktikan dengan adanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pertanian merupakan salah satu pemberdayaan yang paling signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sajiramekar perekonomian masyarakat juga dapat dikembangkan melalui pelatihan dan juga oemasaran, pengembangan usaha pertanian, perikanan serta peternakan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas atau perorangan untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab selaku

anggota masyarakat. Tujuan utama dari Desa Sajiramekar yaitu mengenai pemberdayaan masyarakatnya, pemerintah Desa Sajiramekar sudah menyediakan wadah bagi masyarakat desa yang mempunyai potensi usaha kecil maupun besar dengan memanfaatkan lahan yang ada.

4.3 Analisis Data

Pada penelitian yang dilakukan menganalisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif-kualitatif guna memberikan gambaran atau kondisi Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten. Berikut hasil jawaban pada saat wawancara berlangsung beserta keterangannya :

Tabel 4.13

Tafsiran Nilai

Keterangan	Interval
Sesuai	5
Tidak Sesuai	1

Sumber : Rofiyatul Adawiyah 2021.

Tabel 4.14

Kriteria Penilaian Berdasarkan Angka Penafsiran

Interval	Kriteria
1,00-1,80	Tidak baik
1,81-2,60	Kurang
2,61-3,40	Cukup
3,41-4,20	Baik
4,21-5,00	Sangat baik

Sumber : Rofiatul Adawiyah 2021.

4.3.1 Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sajiramekar Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi melalui wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa sangatlah berpengaruh. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.15

Hasil Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Kesesuaian Prosedur dalam penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.	Sesuai	6	30	4,00	Baik
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa	Sesuai	8	40	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	8	40		
Kejujuran dan keterbukaan dalam informasi.	Sesuai	6	30	4,00	Baik
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Keterlibatan dalam Pengelolaan dana desa	Sesuai	8	40	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	8	40		
Total	4,00 + 5,00 + 4,00 + 5,00 = 18,00 / 4			4,50	Sangat Baik

Data diolah oleh penulis pada tahun 2022

Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 pada indikator peran dana desa ini dengan nilai rata-rata sebesar 4,50 dengan kriteria sangat sesuai atau sangat baik, dapat diartikan bahwa peran dana desa di Desa Sajiramekar untuk pemberdayaan masyarakat ini sudah sesuai atau sudah sangat baik dalam penggunaannya.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil tabel diatas dengan adanya kesesuaian prosedur dalam penggunaan dana desa dilakukan dengan sangat sesuai oleh pemerintah desa.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sajiramekar yaitu Bapak Jaenudin menyatakan bahwa :

“ Peran dana desa itu sangat penting bagi kami untuk pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya dana desa perencanaan akan berjalan lancar itupun bagaimana kita menggunakan dana tersebut, tapi insyaallah untuk Desa Sajiramekar ini kami gunakan sebaik mungkin dan sesuai prosedur yang ada. Masyarakatpun mengetahui penggunaan dana tersebut untuk apa karena kami selalu mengadakan musyawarah desa (MusDes) dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Dan sebenarnya pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa itu ada cuma dinamakan dengan dana desa subsidi dan

jumlahnya itu hanya kurang lebih hanya Rp.5.000.000, atau terbatas dan partisipasi masyarakat sebelum adanya dana desa juga sangat kurang. Maka pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi misalnya memang tidak cukup terdengar di masyarakat selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal. Akan tetapi setelah adanya dana desa alhamdulillah sekarang pemberdayaan masyarakat lebih terarah walaupun masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat itu ialah kurangnya anggaran dana desa ”

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa bahwa adanya kucuran dana langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sajiramekar selama ini belumlah berjalan secara maksimal walaupun seluruh karyawan Desa Sajiramekar sudah melakukan yang terbaik, terutama sebelum adanya kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur di Desa Sajiramekarpun kerap kali berbentur dengan terbatasnya anggaran dana yang tersedia.

Dalam wawancara dengan Bapak Sudirja selaku Kepala Seksi Pembangunan, beliau mengatakan hal yang sama bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya anggaran dana desa dan sebelum adanya dana desa pemerintah desa hanya melakukan pemberdayaan yang sangat minim dengan dana seadanya.

“ keadaan ekonomi masyarakat Desa Sajiramekar secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa. Masyarakat ada yang bertani dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana dan jalan maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan. Selain itu, ketika pihak pemerintah desa ingin mengadakan perbaikan infrastruktur misalnya kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia”.

Pemberdayaan masyarakat Desa Sajiramekar sebelum adanya dana desa memang terlihat cukup kurang atau sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, keadaan infrastruktur masih belum baik seperti jalan, jembatan dan yang lainnya yang berada diperkampungan.

Dengan seiring berjalannya waktu Pemerintah semakin memperhatikan perkembangan pedesaan, aliran dana yang cukup besar dialirkan disetiap desa di Indonesia denganharapan desa mampu berkembang dan tidak semakin tertinggal dengan kemajuan kemajuan yang telah dirasakan diwilayah perkotaan. Begitu pula dengan Desa Sajiramekar yang mendapatkan aliran dana tersebut secara perlahan pemerintah Desa Sajira mengupayakan perbaikan disegala lini mulai dari pembangunan infrastruktur yang tercermin dari adanya pembangunan atau

perbaikan jalan diperkampungan melalui dana desa pemerintah Desa Sajiramekar mengalokasikan anggaran dana untuk sektor pembangunan yang jumlahnya yakni sebesar Rp.122.147.000,.

Dalam wawancara dengan Bapak Tabroni selaku Sekretaris Desa :

“ Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tingkatkan, contohnya seperti Pengadaan BUMDES menjual kebutuhan pertanian, pengadaan KWT (Kelompok Wanita Tani yang berasal dari Program PKK), pengelolaan lingkungan hidup milik desa dalam kegiatan pembangunan yaitu membangun monumen gapura batas desa, dalam kegiatan kesehatan yaitu penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penyelenggaraan Posyandu, dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa, pemberdayaan Linmas”.

Sebelum adanya dana desa memang hal-hal yang khususnya bersifat pemberdayaan masyarakat dan ataupun pembangunan tidak begitu terasa, hal ini dikarenakan salah satunya adalah terbatas anggaran yang tersedia. Melihat keadaan sekarang dengan adanya dana desa ini mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dalam mengupayakan perbaikan Desa Sajiramekar, pembangunan dalam aspek fisik atau infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek perlulah ditingkatkan. Dengan dana yang terbilang besar bagi desa sekarang dalam rangka meningkatkan kualitas desa dan kualitas masyarakat agar lebih maju dan lebih baik lagi. Selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tabroni sesudah adanya dana desa di Desa Sajiramekar memperoleh dana sebesar Rp.1.145.399.800, yang dana tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan (BK).

4.3.2 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sajiramekar dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Dana Desa

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud disini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat, aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan

oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan disegala segi kehidupan.

Tabel 4.16
Hasil Wawancara Upaya-Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Uraian	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Nilai	Nilai Rata-Rata	Kriteria Penilaian
Pemerintah desa mengadakan musyawarah kedesunan (MUDUS) disetiap kedesunan dan dihadiri oleh setiap elemen masyarakat	Sesuai	8	40	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	8	40		
Kinerja pemerintah desa sangat bagus dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.	Sesuai	5	25	3,50	Baik
	Tidak Sesuai	3	3		
	Jumlah	8	28		
Pemerintah desa sudah menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan sangat baik.	Sesuai	6	30	4,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Banyaknya pembangunan infrastruktur dan lahan pekerjaan untuk pemberdayaan masyarakat.	Sesuai	5	25	3,50	Baik
	Tidak Sesuai	3	3		
	Jumlah	8	28		
Total	5,00 + 3,50 + 4,00 + 3,50 = 16,00 / 4			4,00	Baik

Data diolah oleh penulis pada tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada tabel 4.16 mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sajiramekar dengan nilai rata-rata 4,00 dengan kriteria sesuai atau baik dapat diartikan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan sebaik mungkin.

Dalam penjelasan membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa maka hal ini tidak akan

terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa.

Menurut kaur umum Desa Sajiramekar yaitu Ibu Haifa menyatakan bahwa tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa adalah melalui program-program kerja desa yang mekanismenya dimulai dengan :

1. Pemerintah desa mengadakan musyawarah kedesunan (MUDUS) di setiap kedesunan dan dihadiri oleh setiap elemen masyarakat di kedesunan yang tujuannya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat, program yang diinginkan masyarakat serta yang harus direalisasikan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintahan.
2. Setelah semua hasil MUDUS tertampung, serta semua aspirasi di setiap kedesunan tertampung, maka dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa) yang dihadiri oleh tokoh agama, pemuda yang bertujuan untuk menentukan skala prioritas program apa saja yang harus didahulukan di lapangan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, MUSDES adalah untuk menentukan program-program berdasarkan usulan yang telah diajukan pada selanjutnya disebutkan dengan skala prioritas, misalnya pembahasan aspirasi yang diajukan oleh Dusun satu yaitu pembangunan jalan. Dalam pelaksanaan MUSDES dilakukan setiap akhir tahun yaitu pada bulan Desember yang disetujui oleh Pemerintah Desa Sajiramekar adalah pembangunan jalan hal ini dikarenakan pembangunan jalan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yakni memperbaiki ataupun membangun infrastruktur di perkampungan. Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Setidaknya hal tersebut yang menjadi tahapan sebelum pelaksanaan program dilakukan kepada masyarakat. Tahap diatas akan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa Sajiramekar dalam upayanya melaksanakan segala bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai satu bentuk strategi pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan yang lainnya.

Secara umum fungsi dari pemerintahan setidaknya mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintahan desa itu sendiri adaah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

Setidaknya hal serupapun dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sajiramekar yang memang diharapkan mampu meningkatkan segala bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa upaya yang memang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Sajiramekar dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala nasional tidak hanya itu dengan berjalannya pembangunan infrastruktur akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Desa Sajiramekar saat ini memang belumlah berjalan secara pesat, hal ini dalah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belumlah sepenuhnya memadai salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa. Sesuai dengan salah satu misi dari Desa Sajiramekar yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Desa Sajiramekar melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari program Dana Desa (DD), pemerintah Desa Sajiramekar dalam pemanfaatan dana desanya secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatkan pembangunan infrastruktur. Dana desa yang digunakan oleh pemerintah Desa Sajiramekar dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa dan perbaikan jalan ke tempat pemukiman.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2021 Pemerintah Desa Sajiramekar telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan di dusun-dusun dengan konstruksi cor beton. Dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Sajiramekar telah mengalokasikan dana sebesar Rp.115.047.000,.

Melihat pembangunan dari pemerintah desa yang didorong dengan adanya program dana desa dari tahun 2019 sampai 2021, terdapat tanggapan wawancara dengan Bapak Muhamad dikatakan bahwa :

“ Sekarang memang pemerintah desa keliatan pembangunanya seperti adanya pembangunan jalan dan yang lain juga. Semua ini demi membangun desa agar lebih maju lagi yang sangat penting dan harus diingat Kepala Desa dan jajarannya yaitu terus lanjut pembangunan jangan sampai dihentikan”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Komarudin dalam wawancara :

“ Menurut saya dengan adanya pembangunan jalan, gorong-gorong ini sangat bagus untuk memudahkan masyarakat dan semenjak saat ini Pemerintah Desa Sajiramekar dalam masalah pembangunan sangatlah bagus dan sangat terasa perbedaannya”.

Pembangunan secara bertahap, menyeluruh kepada tiap kampung yang berada di Desa Sajiramekar nemapknya mulai dilakanakan dan cukupmembuahkan hasil

seperti pembangunan jalan di beberapa kampunglah yang dapat menjadi tolak ukurnya.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sajiramekar pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sajiramekar benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah Desa Sajiramekar menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Pemerintah Desa Sajiramekar mengalokasikan dana dari program dana desa sebesar Rp. 18.000.000, pada tahun 2021 untuk mengadakan bangunan dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan pada kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi, balita ataupun ibu hamil. Hal ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dalam hal kesehatan masyarakat Desa Sajiramekar.

Dalam wawancara dengan Bapak Tabroni selaku sekretaris desa mengatakan bahwa :

“Dalam pemberdayaan bidang kesehatan kami membangun Posyandu di setiap lingkungan itu salah satu pemberdayaan dalam bidang kesehatan melalui anggaran dana desa. Selain itu dalam bidang kesehatan juga memberdayakan kader Posyandu yang bersinergi dengan bidan yang ada di desa, pelaksanaan posyandu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Kemudian juga mengalokasikan sarana-sarana penunjang kesehatan seperti timbangan bayi dan alat cek ibu hamil”.

Dalam hal kesehatan pula pemerintahan Desa Sajiramekar mengalokasikan dana sejumlah Rp.18.000.000, /9bulan dalam pembinaan PPKBD dan sub PPKBD yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam Program Keluarga Berencana (KB).

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD dan Perpustakaan Desa

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cekap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain, pendidikan dapat

diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Masyarakat Desa Sajiramekar jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun bahkan banyak yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Lebih dari 60% masyarakat Desa Sajiramekar telah mencapai 9 tahun belajar atau telah mencapai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP).

Dalam perhatian pemerintah dan masyarakat membentuk program pembinaan serta pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang dianjurkan pada masyarakat agar anak-anak pada usia dini dapat terdidik, disiplin dan memiliki mental yang baik. Dalam pemberdayaan ini pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp.12.000.000, kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak sejak dini di Desa Sajiramekar cukup baik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang menyekolahkan anak-anak di PAUD Desa Sajiramekar.

4. Pengembangan Keolahragaan

Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana desa sejumlah Rp.11.453.838, dalam pengembangan keolahragaan masyarakat Desa Sajiramekar Pemerintah Desa mengajak Masyarakat khususnya pemuda untuk aktif dalam keolahragaan hal ini dimaksud agar masyarakat desa bisa berkumpul dan dapat menjalin komunikasi dengan baik antar sesama masyarakat, selain itu perhatian pemerintah pada kesehatan masyarakat.

5. Kegiatan keagamaan

Penduduk Desa Sajiramekar merupakan pemeluk agama Islam pemerintah desa menggunakan Dana Desa juga di alokasikan untuk kegiatan keagamaan seperti dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Dalam kegiatan keagamaan ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.20.000.000, dengan adanya aliran dana desa untuk kegiatan keagamaan Desa Sajiramekar masyarakatnya sangat antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan contohnya dalam peringatan Maulid Nabi yang semakin meriah.

Dalam wawancara dengan Bapak Ustad Ume selaku Pengurus Masjid Desa Sajiramekar, beliau menyampaikan :

“Alhamdulillah dengan adanya program pemerintah desa yang dibantu dengan adanya dana desa ini kegiatan keagamaan Desa Sajiramekar dapat berjalan lebih lancar lagi. Pada tahun ini pemerintah desa Sajiramekar menganggarkan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp.20.000.000, dengan anggaran segitu alhamdulillah sangat membantu sekali untuk kami memenuhi kebutuhan kegiatan ini, alhamdulillah sekali sangat terbantu”.

4.3.3 Partisipasi dan Respon Masyarakat Desa Sajiramekar Setelah Adanya Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa

Tabel 4.17

Hasil partisipasi dan respon terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sajiramekar

Uraian	Tanggapan	Jumlah	Nilai	Nilai	Kriteria
--------	-----------	--------	-------	-------	----------

	Responden	Responden		Rata-Rata	Penilaian
Pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.	Sesuai	8	40	5,00	Sangat Baik
	Tidak Sesuai	0	0		
	Jumlah	8	40		
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan secara optimal.	Sesuai	6	30	4,00	Baik
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Adanya kendala saat pemberdayaan masyarakat dilakukan.	Sesuai	6	30	4,00	Baik
	Tidak Sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Masyarakat mengetahui dana desa digunakan untuk apa saja.	Sesuai	6	30	4,00	Baik
	Tidak sesuai	2	2		
	Jumlah	8	32		
Total	5,00 + 4,00 + 4,00 + 4,00 = 17,00 / 4			4,25	Sangat Baik

Data diolah oleh penulis tahun 2022

Dari tabel hasil wawancara diatas mengenai partisipasi dan respon masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sajiramekar menunjukkan hasil yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai rata-rata 4,25 dapat diartikan bahwa partisipasi dan respon masyarakat sangat baik walaupun masih adanya sebagian yang kurang berpartisipasi akan tetapi semua itu tidak terlalu berpengaruh kepada hal yang lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan yaitu partisipasi masyarakat merupakan salah satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, akan menimbulkan anggapan pemenuhan hak demokrasi ketika mereka ikut terlibat dalam pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya serta yang paling adalah

segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Sajiramekar dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat dan mensosialisasikan pendapatan dan dana desa tersebut.

Proses atau program pemberdayaan di Desa Sajiramekar mulai dilaksanakan, perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya pemerintahan Desa Sajiramekar sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Sajiramekar itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Sajiramekar melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Dalam wawancara dengan Bapak Agus Sofyan selaku Ketua Seksi Pemerintahan mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa Sajiramekar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan atau yang lainnya walaupun tidak semuanya ikut berperan. Mereka yang ikut serta pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut berpartisipasi dalam kegiatannya. Contohnya jika Pemerintah Desa Sajiramekar meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat mereka akan hadir untuk menyumbangkan ide-idenya dan apa yang diinginkan warga sekitar, jika dibutuhkan tenaga untuk pembangunan masyarakatpun ikut kerjasama untuk menyelesaikan program pembangunan itu”.

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan sikap masyarakat setempat serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab terutama terhadap program yang mereka inginkan.

Dalam wawancara dengan Bapak Komarudin mengatakan bahwa :

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal perencanaannya sampai pelaksanaannya seperti pemerintah desa mengadakan musyawarah desa, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan mereka pun hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan jalan dan jembatan”.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam proses perencanaan sampai tahap pelaksanaan hal ini dimaksudkan agar masyarakat ikut serta secara menyeluruh dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan juga dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi sebuah garansi untuk tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa Sajiramekar setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa, berbagai respon pun muncul dari masyarakat terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Sajiramekar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi terutama dalam hal pemberdayaan. Untuk kedepannya semoga program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja dana desa ini digunakan dengan tepat guna dan sasaran.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Komarudin mengungkapkan bahwa perihal pembangunan infrastruktur umum seperti pengelolaan pendidikan usia dini dan pos pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sajiramekar cukup baik dan memang terasa manfaatnya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pembangunan saja melainkan pemerintah desa harus membuat wadah yang mampu menjadi instrumen bagi masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan desa itu sendiri yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip partisipasif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Desa Sajiramekar dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan cara masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Dari wawancara dengan bapak Muhamad selaku salah satu masyarakat Desa Sajiramekar mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasarkan dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap RT yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Kemudian tidak kalah pentingnya adalah proses pertanggungjawaban seperti dalam wawancara dengan Bapak Ustad Ume, beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Sajiramekar sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan amanah, akan tetapi harus lebih transparan kepada masyarakat juga contohnya seperti penggunaan dana desa di tempel di poskamling atau diumumkan secara terbuka. Selain bukti nyata pembangunannya masyarakat juga mengetahui anggarannya”.

Pertanggungjawaban, transparansi merupakan suatu kewajiban dan suatu bentuk keharusan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sajiramekar sebagai administrasi pemberdayaan yang lainnya sekaligus pengelolaan keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima atau sebagai kelompok sasaran program. Tujuannya dari adanya pertanggungjawaban dan transparansi ini adalah suatu langkah untuk menjaga dari ketidakjelasan akan penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Ketika semua ini dilakukan semana mestinya maka diharapkan akan mampu memenuhi tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa Sajiramekar itu sendiri.

4.4 Pembahasan dan interpretasi penelitian

4.4.1 Peran Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan mengenai Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten dapat ditarik kesimpulan mengenai peran dana desa sangatlah berperan penting bagi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri

Tabel 4.18
Tingkat Kesesuaian

No	Indikator	Teori	Data	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1.	Keseluruhan kegiatan yang meliputi partisipasi, akuntabilitas, keterlibatan dan pengelolaan dana desa.	Kesesuaian Prosedur dalam penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.	Pemerintah Desa Sajiramekar telah melakukan penggunaan dana desa sesuai prosedur yang ada.	√	
		Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa	Pemerintah desa mengadakan musyawarah kedusunan (MUDUS) disetiap kedusunan dan dihadiri oleh setiap elemen masyarakat.	√	
		Kejujuran dan keterbukaan dalam informasi.	Pemerintah Desa Sajiramekar telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Karena disetiap tahunnya pemerintah Desa Sajiramekar melaksanakan Musyawarah Desa dengan semua masyarakat agar terbukanya antara masyarakat dengan pemerintah desa.	√	
		Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat.	Pemerintah Desa Sajiramekar melakukan pelaporan secara bertahap kepada camat untuk disampaikan kepada Bupati	√	
2.	Pemberdayaan masyarakat ditinjau	Partisipasi dan respon masyarakat dalam	Masyarakat Desa Sajiramekar telah ikut serta	√	

	dari perspektif ekonomi	proses perencanaan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan secara optimal.	dalam segala kegiatan yang berhubungan desa pemberdayaan masyarakat.		
		Upaya dan Realisasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat	Pemerintah desa sudah berupaya dalam segala hal dan sudah merealisasikan pembangunan jalan, infrastruktur dalam bidang pendidikan , kesehatan dan perekonomian.	√	
		Keikutsertaan masyarakat atas keterlibatan Peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.	Masyarakat Desa Sajiramekar antusias ikutserta dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat karena menurut masyarakat peran dana desa sangatlah penting untuk memajukan Desa Sajiramekar	√	

4.4.1 Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Sebelum dan sesudah adanya dana desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pemberdayaan masyarakat sesudah adanya dana desa berjalan dengan semestinya tidak seperti sebelum adanya dana desa, sebelum adanya dana desa pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan lancar karena hambatan anggaran dana desa.

Dapat disimpulkan dalam wawancara yang telah dilakukan bahwa pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangatlah terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur Desa Sajiramekar dikala itu sangatlah terbengkalai atau tidak berjalan semestinya.

Peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Sajiramekar dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Sajiramekar. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar dalam artian pembangunan terus

berjalan dalam membenahi infrastruktur desa seperti jalan yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya rusak sekarang menjadi jalan cor beton.

Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Sajiramekar setelah adanya dana desa sebagai pendorong terlaksananya program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan mencapai kemandirian desa yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa. Dengan adanya dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh dalam artian pemerintah memandang jauh kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara, dengan digulirkannya dana desa sebagai stimulan pembangunan dan pemberdayaan yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat karena setiap tatanan memiliki karakteristik sendiri sehingga tidak semua strategi yang berasal dari luar tatanan akan efektif bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi dan transformasi.

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (powerless).

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih meratakan pendapatan.

Kementerian Keuangan merincikan sejumlah prioritas penggunaan dana desa terkait pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup serta menaggulangi kemiskinan. Prioritas dari dana ini disalurkan melalui cara-cara berikut :

1. Prioritas pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Pengembangan pos kesehatan desa dan pondok bersalin desa.
 - Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
 - Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Prioritas pembangunan sarana dan prasarana desa.
 - Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
 - Pembangunan dan pemeliharaan cekungan penampungan atau embung desa.
 - Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala besar.
 - Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 7 Tahun 2021 terdapat tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa yaitu :

1. Pemulihan ekonomi nasional di desa.
 - Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
 - Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata.
 - Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2. Program prioritas nasional di desa.
 - Pendapatan desa, pemerataan potensi dan sumber daya, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dalam pembangunan desa.
 - Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata.
 - Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.
 - Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.
 - Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
3. Program mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam di desa.
 - Mitigrasi dan penanganan bencana alam.
 - Mitigrasi dan penanganan bencana nonalam.
 - Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dalam wawancara dengan Bapak Sudirja selaku kepala seksi Pembangunan Desa Sajiramekar beliau mengatakan hal yang sama, dimana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintah desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

“ keadaan ekonomi masyarakat Desa Sajiramekar secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa. Masyarakat ada yang bertani dan

juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana dan jalan maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan. Selain itu, ketika pihak pemerintah desa ingin mengadakan perbaikan infrastruktur misalnya kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia”.

Dalam wawancara dengan Bapak Tabroni selaku Sekretaris Desa Sajiramekar mengatakan bahwa :

“ Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tingkatkan, contohnya seperti Pengadaan BUMDES menjual kebutuhan pertanian, pengadaan KWT(Kelompok Wanita Tani yang berasal dari Program PKK), pengelolaan lingkungan hidup milik desa dalam kegiatan pembangunan yaitu membangun monumen gapura batas desa, dalam kegiatan kesehatan yaitu penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penyelenggaraan Posyandu, dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa, pemberdayaan Linmas”.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sajiramekar dapat disimpulkan bahwa setelah adanya dana desa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Seperti pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dilihat dengan diadakannya BUMDes yang menjual kebutuhan pertanian sebagai salah satu solusi dalam membantu masyarakat desa yang mayoritasnya adalah seorang petani meskipun dalam kenyataannya belum dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat.

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu :

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu melalui bimbingan yang bertujuan untuk membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan. Biasaya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan tersebut.

c. Aras Makro

Sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan bapak Tabroni selaku Sekretaris Desa Sajiramekar dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengguankan pendekatan tiga aras diatas. Dimana pemerintah desa dalam memberdayaan LINMAS sebagai alat keamanan desa dalam ha ini pemerintah mengadakan pelatihan linmas menjadi sosok yang bertanggungjawab. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota keamanan desa, pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa untuk intensif anggota linmas. Aras Mezzo pemerintah Desa Sajiramekar menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan. Hal ini terwujud dalam pemberdayaan PKK yang pada kelompok ini diberikan penyuluhan dan pelatihan berbagai macam cara bertani dan menanam sayuran. Aras Makro pada pendekatan ini terwujud dengan terlaksananya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa dapat dilihat bahwa pemerintah dan masyarakat selalu bekerjasama, bermusyawarah dan menyepakati usulan masyarakat membentuk program dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

4.4.2 Upaya Pemerintah Desa Sajiramekar Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Desa Sajiramekar upaya meningkatkan pemberdayaan desa sudahlah sangat sesuai atau sangat baik karena dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Sajiramekar perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan pembangunan desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa, peran masyarakat dalam hal ini adalah analisis mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam pembangunan masyarakat berperan dalam program swakelola pembangunan desa.

Menurut Permendes No 21 tahun 2020 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mawadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjuka untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang telah dilakukan. Kemandirian masyarakat adalah kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

Pada pemberdayaan yang berlangsung di Desa Sajiramekar tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengenai pada masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musyawarah Dusun dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan, secara khusus bertujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang atau sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Strategi.

Pada prinsip strategi yang dijalankan oleh pemerintah Desa Sajiramekar dengan melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang kebutuhan dan program yang akan diajukan dalam musdes agar dapat terwujud. Pada MusDus yang diikuti oleh RW dan perwakilan dari setiap RT. Setelah MusDus dilaksanakan hasil dari musyawarah dusun setiap dusun akan dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrenbang.

b. Demokratis dan partisipasi.

Perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat dalam

setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan. Dalam hal ini pemerintah Desa Sajiramekar melibatkan seluruh aspek yang ada mulai dari perangkat desa, masyarakat dan lembaga atau organisasi yang ada di Desa Sajiramekar dalam awal perencanaan, pengelolaan dan sampai akhir yaitu pertanggungjawaban.

c. Politik

Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dan kekuatan polisi terutama kepala desa dan BPD. Berjalannya perencanaan, pengelolaan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu berdampingan dengan BPD hal ini diharapkan akan mendukung berjalannya program serta terdapat pengawasan dan komunikasi antara pemerintah desa dan BPD.

d. *Bottom-up Planning*

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip ini terealisasi dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam Mudus maupun Musdes untuk kepentingan bersama, misalnya pembahasan aspirasi yang diajukan oleh dusun yakni pembangunan jalan serta pengadaan irigasi. Dalam pelaksanaan Musdes yang disetujui oleh Pemerintah Desa Sajiramekar adalah pembangunan jalan dikarenakan pembangunan jalan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah desa yakni memperbaiki ataupun membangun infrastruktur di perkampungan.

e. *Top-down Planning*

Perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana startegis di atasnya dan komitmen pemerintahan. Pada umumnya perencanaan pembangunan desa yang ada di Desa Sajiramekar ditekankan oleh pemerintah kabupaten pada setiap desa adalah pembangunan fisik desa, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan dan sarana kesehatan.

4.4.3 Partisipasi Masyarakat Desa Sajiramekar Dengan Adanya Program Dari Dana Desa

Partisipasi masyarakat Desa Sajiramekar sangatlah diperlukan dalam program dana desa ini dan hal itu sudah dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa partisipasi masyarakat desa Sajiramekar dilakukan dengan sangat baik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk pemberdayaan pemberdayaan atau pembangunan di Desa Sajiramekar sangatlah diperlukan hal ini dikarenakan agar setiap program yang dilaksanakan memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan sikap masyarakat setempat serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab terutama terhadap program yang mereka inginkan.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan yang lainnya di pedesaan kerap kali kurang berjalan dengan baik fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut akibat terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Proses atau program pemberdayaan di Desa Sajiramekar mulai dilaksanakan perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya Pemerintah Desa Sajiramekar sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Sajiramekar itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Sajiramekar melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Sajiramekar dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat.

Dalam wawancara dengan bapak Agus menyampaikan bahwa :

“Masyarakat Desa Sajiramekar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan atau yang lainnya walaupun tidak semuanya ikut berperan. Mereka yang ikut serta pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut berpartisipasi dalam kegiatannya. Contohnya jika Pemerintah Desa Sajiramekar meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat mereka akan hadir untuk menyumbangkan ide-idenya dan apa yang diinginkan warga sekitar, jika dibutuhkan tenaga untuk pembangunan masyarakatpun ikut kerjasama untuk menyelesaikan program pembangunan itu”.

Dalam wawancara dengan Bapak Komarudin selaku masyarakat di Desa Sajiramekar, mengatakan bahwa :

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal perencanaannya sampai pelaksanaannya seperti pemerintah desa mengadakan musyawarah desa, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan mereka pun hadir serta ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan jalan dan jembatan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Sajiramekar sangat baik dalam membangun desa bekerjasama dengan pemerintahan desa menjalankan program yang telah disepakati secara bersama. Dari mulai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada pembuatan pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa.

4.4.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar

Pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan dana desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Program pemberdayaan desa yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat desa yang memiliki mayoritas pekerja sebagai petani dan peternak. Perlu memiliki keterampilan yang dapat mengembangkan profesi agar dapat meningkatkan taraf hidup pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi.

Program pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan pembentukan sikap mental melalui sikap mandiri dalam berusaha. Diakui bersama bahwa cara atau sistem petani sampai saat ini umum masih bersifat tradisional. Pengembangan sikap mental adalah melalui pendidikan nonformal, peningkatan melalui penyuluhan secara terus menerus agar petani memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang pertanian.

- Faktor pendukung

Faktor pendukung berdasarkan temuan dilapangan yang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi desa di Desa Sajiramekar, yaitu:

- a. Dukungan dari pemerintah Desa Sajiramekar mengenai Program-program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya.
- b. Dukungan dari masyarakat Desa Sajiramekar, baik tokoh masyarakat maupun warga secara umum.
- c. Antusias masyarakat Desa Sajiramekar itu sendiri.
- d. Tingkat pendidikan.
- e. Tingkat kesehatan.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Sajiramekar untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Sajiramekar sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak Tabroni selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa :

“ Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan sebagainya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita tingkatkan, contohnya seperti Pengadaan BUMDES menjual kebutuhan pertanian, pengadaan KWT(Kelompok Wanita Tani yang berasal dari Program PKK), pengelolaan lingkungan hidup milik

desa dalam kegiatan pembangunan yaitu membangun monumen gapura batas desa, dalam kegiatan kesehatan yaitu penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penyelenggaraan Posyandu, dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal milik desa, pemberdayaan Linmas”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah Desa Sajiramekar berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri yang memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten, dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, keamanan serta perekonomian.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi, pemerintah Desa Sajiramekar berperan dalam :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan untuk mendukung proses yang dilalui.
2. Meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pemanfaatan dan peningkatan maupun kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.
3. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat melalui pengembangan agribisnis dengan memfokuskan kepada pengembangan organisasi bisnis terutama dibidang pertanian.

Pemberdayaan telah membuat cara tersebut sudah sesuai dengan tahapan penyaluran yang ada dibagian tahap pemberdayaan dan pemerintah daerah tetap harus mempertahankan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelum akan melakukan suatu program agar hasilnya baik dan masyarakat nantinya akan lebih memahami.

Capacity building dan networking pada tahap ini masyarakat akan diberikan pelatihan sebelum menjalankan program peningkatan penjualannya berdasarkan penjelasan penulis memberikan analisis yang berlandaskan pada tahap pemberdayaan. Potensi yang ada di Desa Sajiramekar sangat membantu masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan sekitar, kemudian potensi untuk mengajak masyarakat sekitar untuk bangkit dan menambah pengetahuan, maka pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang ada untuk membantu masyarakat agar menambah penghasilan.

Mendukung pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi desa kedepannya, pemerintah desa memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas.

e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan pemerintah desa.

- Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi oleh pemerintah Desa Sajiramekar diantaranya yaitu keterbatasan anggaran dana yang ada. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Sajiramekar diantaranya yaitu merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk mengalokasikan ke pelatihan dan pembangunan serta pemerintah desa meminta bantuan kepada pihak dinas terkait yang ahli dalam perekonomian untuk menjadi narasumber untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Desa khususnya dibidang pertanian dengan pelatihan dan penyuluhan secara terus menerus agar petani memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang pertaniannya masyarakat bisa membuka lapangan kerja bagi warga sekitar yang menganggur dan mengurangi kemiskinan di Desa Sajiramekar agar meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Sajiramekar sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah masih rusak begitupula dengan jalan-jalan yang lainnya serta belum adanya pembangunan-pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sajiramekar.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sajiramekar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sajiramekar yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan dan pemberdayaan adalah program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Sajiramekar.
3. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Sajiramekar bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat desa untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab.
4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Desa Sajiramekar ini berubah menjadi lebih baik lagi dengan mayoritas masyarakat desa yang bekerja sebagai petani yang tidak memiliki keterampilan untuk pengelolaan hasil panen dengan adanya program pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa mengalami hambatan-hambatan sehingga diperlukannya upaya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencana anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa Sajiramekar pemberdayaan masyarakat alangkah baik tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada dimasyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan agar masyarakat mampu berkembang seperti contoh pembuatan pasar desa, pembuatan kelompok ekonomi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri.
2. Transparansi dana kepada masyarakat lebih ditingkatkan seperti contoh membuat banner tentang dana desa, penempelan di setiap tempat tertentu yang bertujuan agar meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kepada masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kemandirian dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat, masyarakat mampu menggali potensi yang lebih lagi agar kedepannya mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang analisis peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi diharapkan memperhatikan variabel yang digunakan agar lebih lengkap dan menghasilkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Saibani. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Ambar, Sulistiani, Teguh. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arif, Perbantara, Mujianto. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Indikator Pemberdayaan Masyarakat*.
- Ansori, Teguh. (2019). *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 1(2), 117–128.
- Dede, Ruth & Maryani. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jl. Rajawali: CV Budi Utama.
- Edi, Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5.*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Filosofi dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. (2011). 1–13.
- Hardiansyah, T. R. I., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., Thaha, S., & Jambi, S. (2022). *MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Lubuk Sayak , Kec . Pelawan , Kab)*
- Hermawan, Endang. (2021) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Penelitian, Vol.2, No.1 Juni 2021*
- Hukumonline.com. (2021). *Dana Desa Dan Prioritas Penggunaannya Pada 2022*. [Www.Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-1t61ce6eac3b619](https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-1t61ce6eac3b619)
- Iskandar, A. H. (2020). Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Peraturan Menteri Desa No 21 Tahun 2020*, 3-20.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. "Buku Pintar Dana Desa." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 113*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. (2020).
- Pemberdayaan Masyarakat*. (2009). 13–37.
- Pembangunan, Jurusan Ekonomi et al. 2019. "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(04): 95–106.

PERMENDAGRI Tentang Laporan Kepala Desa. (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.” (2): 1–25.

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.* 1–11. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176576/Salinan_Perpres_Nomor_104_Tahun_2021.pdf

Shintia Dewi, I. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ekonomi Syariah*, 8(5), 55.

Sukanto, & Azwardi. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No 1. (Juni 2014)

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurlela
Alamat : Kp.Muara Rt04/10 Desa. Ciburuy, Kec. Cigombong,
Kab. Bogor 16110
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 02 Oktober 1999
Agama : Islam
Pendidikan :

- SD : SDN Srogor 01
- SMP : SMP Mardi Yuana Cicurug
- SMA : MAN 04 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, November 2022



(Siti Nurlela)

LAMPIRAN

Lampiran 1

	<h1>Universitas Pakuan</h1> <h2>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</h2> <p style="font-size: small;">S1 Sarjana "Farmakologi A" S1 Akutansi "Farmakologi A" S1 Bina Digital "Farmakologi" Jl. Pakuan P.O. Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314818 (Gisting)</p>	
Nomor	: 1014 /WD.1/FEB-UP/IX/2022	03 Agustus 2022
Lampiran	:	
Perihal	: Permohonan Riset / Magang / Data	
Kepada	: Yth. Pimpinan, KANTOR DESA SAJIRA MEKAR Jl. Desa Sajiramekar, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.	
Dengan hormat		
Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Maka bersama ini kami hadapkan:		
Nama	: Siti Nurlela	
NPM	: 022118269	
Program Studi	: Akutansi	
Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengizinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.		
<p style="font-size: small;">s.n. Dekan, W. KARDIYONO, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p>  Dr. Retno Mulyati Endah Lestari, SE., M.Ss., CMA., CAPM.		
Tembusan :		
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).		
Website : https://feb.unpak.ac.id/ e-mail : febekonomi@unpak.ac.id		



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN SAJIRA
DESA SAJIRAMEKAR
JL. PRABU DALEM WONO BAGATI SAJIRAMEKAR KODE POS 42371
SAJIRA

Sajira Mekar, 04 Agustus 2022

Nomor : 147/377-Des/2022
Perihal : Ijin Magang dan Permohonan Data

Kepada Yth :
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
DI -
Bogor

Berdasarkan Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Nomor:1014/WD.1/FEB-UP/EX/2022 Perihal Riset/ Magang/ Data tertanggal 3 Agustus
2022, Pemerintah Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Telah menerima mahasiswa yang
menyampaikan permohonan data tersebut yaitu :

Nama : SITI NURLELA
NPM : 022118269
Program Studi : AKUNTANSI

Demikian Surat keterangan ini kami buat dan untuk dapat di gunakan sebagai mana
memutunya.



Lampiran 2

Wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Jaenudin)



Hasil Wawancara

Nama : Jaenudin

Jabatan : Kepala Desa

Tempat wawancara : Ruang Kerja Kepala Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?	Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa yaa tentunya sudah ada akan tetapi tidak berjalan dengan semestinya .
2.	Apakah pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ?	Keterbukaan dan transparansi alhamdulillah sudah dilakukan, setiap tahunnyapun kami selalu mengadakan musyawarah desa dan didalamnya membahas tentang dana yang masuk dan keluar.
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakat terutama setelah adanya dana desa alhamdulillah baik sekali, dengan adanya musyawarah

		desa kami selalu menyampaikan serta meminta pendapat kepada masyarakat tentang perencanaan pemberdayaan masyarakat.
4.	Adakah kendala dalam pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa?	Kendala sebelum adanya dana desa sangatlah banyak yang pertama sangat kecilnya anggaran yang diterima, kedua partisipasi masyarakat ketika belum adanya dana desa pun sangatlah minim.
5.	Setelah adanya dana desa apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa setelah adanya dana desa yang pertama yaitu berusaha mensejahterakan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakatnya, kedua membangun infrastruktur untuk kemajuan desa itu sendiri.
6.	Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?	Dengan adanya dana desa Alhamdulillah berjalan dengan semestinya.
7.	Apakah saja kendala dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ?	Yaa kalau kendala sudah pasti ada dan jelas karena kurangnya anggaran dana desa.
8.	Apasajakah yang sudah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?	Alhamdulillah kalau yang terealisasi itu sudah hampir terpenuhi seperti pembangunan infrastruktur pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
9.	Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur?	Tentu saja kami selaku pemerintah desa dan tim yang lainnya khususnya kepala urusan pemberdayaan dan pembangunan yaitu Bapak Sudirja.
10.	Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktur yang telah ditentukan ?	Pemerintah desa telah melakukan pencatatan Laporan SPJ dan LPJ yang telah dibuat dapat dilihat sendiri laporannya.
11.	Kendala apa saja yang dirasakan selama pembuatan laporan ?	Kendala yang dirasakan hampir tidak ada karna setelah kegiatan selesai diharuskan langsung membuat

		laporannya.
12.	Akan dilaporkan kepada siapa pelaporan tersebut ?	Akan dilaporkan kepada tim pelaksana kegiatan lalu diberikan kepada Kepala Desa dan yang membuat laporannya itu Sekretaris Desa untuk dilaporkan ke Pemerintah Daerah.
13.	Bagaimana transparansi yang diketahui masyarakat ?	Transparansi kepada masyarakat sudah pasti jelas karena kita kan membuat laporan pertanggungjawabannya.
14.	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pemerintah desa Sajiramekar kepada masyarakatnya ?	Jujur saja untuk laporan pertanggungjawaban kita laporkan hanya tertulis dan diumumkan ketika musyawarah bareng.
15.	Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?	Alhamdulillah untuk saat ini tidak mengalami kesulitan karena telah menggunakan aplikasi yang sudah digunakan.

Wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak Tabroni)



Hasil Wawancara

Nama : Tabroni, S., Sos

Jabatan : Sekretaris Desa

Tempat wawancara : Ruang Kerja Sekretaris Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?	Tentu saja ada akan tetapi tidak berjalan semestinya.
2.	Apakah pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ?	Sejak awal pemerintah desa sudah berusaha seterbuka itu dengan masyarakat karna misi kami diawal adalah ingin transparan terhadap masyarakat tentang apapun itu .
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat	Awalnya sebelum adanya dana desa partisipasi masyarakat itu sangat kecil sekali, akan tetapi setelah adanya dana desa yang kami gunakan sebaik mungkin alhamdulillah cepat atau lambat masyarakat berubah menjadi lebih peduli terhadap perencanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
4.	Adakah kendala dalam pemberdayaan	Kendala yang kami rasakan

	masyarakat sebelum adanya dana desa?	yaitu sangat kecilnya anggaran dana desanya.
5.	Setelah adanya dana desa apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Setelah adanya dana desa kita lebih berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan bantuan yang lainnya.
6.	Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?	Sangat lah berjalan alhamdulillah
7.	Apakah saja kendala dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ?	Untuk pemberdayaan masyarakat masih kurangnya anggaran yang diterima.
8.	Apasajakah yang sudah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?	Hampir semua sudah terealisasi akan tetapi diluar bencana alam yang terjadi.
9.	Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur?	Dalam pengawasan dan pembangunan tentu saja kepala urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10.	Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktur yang telah ditentukan ?	Ya tentu saja menggunakan jalur struktur yang telah ditentukan.
11.	Kendala apa saja yang dirasakan selama pembuatan laporan ?	Kendala nya sering menunda suatu tugas.
12.	Akan dilaporkan kepada siapa pelaporan tersebut ?	kepada TPK lalu ke kepdes setelah itu ke sekdes dan dilaporkan ke pemda.
13.	Bagaimana transparansi yang diketahui masyarakat ?	Yaa sudah pasti kami membuat laporannya sehingga jelas mengenai transparansinya.
14.	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pemerintah desa Sajiramekar kepada masyarakatnya ?	Laporan pertanggungjawaban sudah kami tulis dengan jelas.
15.	Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?	Awalnya banyak sekali kendala akan tetapi untuk saat ini kami sudah menggunakan aplikasi yg ada.

Wawancara dengan Kaur Umum (Ibu Haifa)



Hasil Wawancara

Nama : Haifa Septiyani

Jabatan : Kepala Urusan Umum

Tempat wawancara : Ruang Kerja Kaur Umum

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?	Hmm iya ada.
2.	Apakah pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ?	Sudah karena kita bekerja untuk mereka jadi harus transparansi dan partisipasi kepada warga juga.
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat	Untuk saat ini partisipasi masyarakat tergolong baik atau berperan langsung.
4.	Adakah kendala dalam pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa?	Kalau kendala sudah jelas ada.
5.	Setelah adanya dana desa apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Seperti yang sudah dikatakan barusan bahwa fokus utama yaitu masalah pembangunan.

6.	Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?	Berjalan dengan sesuai harapan.
7.	Apakah saja kendala dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ?	Kendalanya kurangnya anggaran
8.	Apasajakah yang sudah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?	Hampir semua sudah terealisasikan.
9.	Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur?	Yang terlibat yaitu kepada seksi
10.	Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktur yang telah ditentukan ?	Ya tentu saja menggunakan jalur struktur.
11.	Kendala apa saja yang dirasakan selama pembuatan laporan ?	Kendala nya sering menunda suatu tugas.
12.	Akan dilaporkan kepada siapa pelaporan tersebut ?	kepada TPK lalu ke kepala desa setelah itu ke sekertaris desa dan dilaporkan ke pemda.
13.	Bagaimana transparansi yang diketahui masyarakat ?	Yaa sudah pasti jelas karena kami membuat laporannya.
14.	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pemerintah desa Sajiramekar kepada masyarakatnya ?	Sudah jelas karena menggunakan laporan tertulis.
15.	Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?	Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada.

Wawancara dengan Kaur Pemerintahan (Bapak Agus)



Hasil Wawancara

Nama : Agus Sofyan
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
 Tempat wawancara : Ruang Kerja

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?	Sudah ada.
2.	Apakah pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ?	Yaa alhamdulillah sudahh.
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakt cukup bagus kadang ga semua ikut berpartisipasi juga.
4.	Adakah kendala dalam pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa?	Kendala yang kami rasakan yaitu sangat kecilnya anggaran dana desanya.
5.	Setelah adanya dana desa apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah	Upaya yang dilakukan lebih ke pembangunan.

	desa dalam pemberdayaan masyarakat?	
6.	Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?	Sudah berjalan dengan semestinya.
7.	Apakah saja kendala dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ?	Untuk kendalaa yaa pasti masalah keuangannya.
8.	Apasajakah yang sudah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?	Hampir semua sudah terealisasikan akan tetapi diluar bencana alam yang terjadi.
9.	Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur?	Yang terlibat itu kepala desa dan kepala seksi pembangunan yaitu bapak sudirja.
10.	Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktur yang telah ditentukan ?	Setahu saya menggunakan jalur struktur yang sudah ada
11.	Kendala apa saja yang dirasakan selama pembuatan laporan ?	Kendala nya sering menunda suatu tugas.
12.	Akan dilaporkan kepada siapa pelaporan tersebut ?	kepada TPK lalu ke kepdes setelah itu ke sekdes dan dilaporkan ke pemda.
13.	Bagaimana transparansi yang diketahui masyarakat ?	Yang diketahui masyarakat itu sudah jelas karena sering mengadakan musyawarah juga bareng masyarakatnya.
14.	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pemerintah desa Sajiramekar kepada masyarakatnya ?	Laporan pertanggungjawaban sudah jelas.
15.	Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?	Tentu saja ada karena setiap tugas pasti ada kendalanya.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan (Bapak Sudirja)



Hasil Wawancara

Nama : Sudirja, S.,Kom
Jabatan : Kepala seksi Pembangunan
Tempat wawancara : Ruang Kerja

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa ?	Dari dulu pemberdayaan masyarakat sudah ada, akan tetapi tidak terealisasikan karena anggaran yang ada.
2.	Apakah pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ?	Alhamdulillah sudah dan bisa dirasakan masyarakat.
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan alhamdulillah mulai terlihat dan terasakan.
4.	Adakah kendala dalam pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa?	Kendala yang utama yaitu anggaran itu sendiri.
5.	Setelah adanya dana desa apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Yang jelas memberdayakan masyarakat dari bidang pendidikan kesehatannya juga dan

		pembangunan.
6.	Berjalankah pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa ?	Setelah adanya dana desa pemberdayaan masyarakat terkerjakan atau terealisasikan.
7.	Apakah saja kendala dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat ?	Jujur saya kendala utamanya itu kadang keterlambatan dan kurangnya anggaran.
8.	Apasajakah yang sudah terealisasi dalam pemberdayaan dan pembangunan ?	Yang sudah terealisasikan yaitu pembangunan seperti pembuatan jalan, drainase, dan lain lainnya.
9.	Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur?	Yang terlibat langsung yaitu kepala seksi pembangunan dan pengawasan.
10.	Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktur yang telah ditentukan ?	Dalam proses pencatatan kami menggunakan struktur yang sudah ditentukan.
11.	Kendala apa saja yang dirasakan selama pembuatan laporan ?	Kendala yang dirasakan yaitu melawan diri sendiri yaitu menghindari penundaan pembuatan laporan.
12.	Akan dilaporkan kepada siapa pelaporan tersebut ?	Kepada tkp lalu diberikan kepada kepala desa yaitu bapak Jaenudin kemudian diberikan kepada sekertaris desa yaitu bapak Tabroni untuk membantu kepala desa dan diserahkan kepada pemda.
13.	Bagaimana transparansi yang diketahui masyarakat ?	Untuk transparansi kepada masyarakat sudah jelas kami mengutamakan hal itu dengan membuat laporan.
14.	Bagaimana laporan pertanggung jawaban pemerintah desa Sajiramekar kepada masyarakatnya ?	Untuk laporan pertanggung jawaban kami tulis secara langsung agar tidak ada kesalahan lagi.
15.	Apakah ada kendala atau kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?	Kalau berbicara masalah kendala yaa jelas pasti semua ada kendalanya akan tetapi untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa ditangani dengan baik.

Wawancara dengan warga Desa Sajiramekar (Bapak Muhamad)



Hasil Wawancara

Nama : Muhamad

Jabatan : Masyarakat Desa

Tempat wawancara : Kediaman bapak Muhamad

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah masyarakat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat?	Iya sudah mulai terasa pemberdayaan masyarakatnya.
2.	Apakah masyarakat terlibat langsung dengan proses perencanaan penggunaan dana desa ?	Dalam proses perencanaan kami terlibat karena sering adanya musyawarah di aula desa.
3.	Apakah pemerintah desa telah jujur dalam penggunaan dana desa?	Yaa ada yang jujur ada yang kurang juga hehe, sesuai kepribadian masing masing.
4.	Apa yang dirasakan setelah adanya pemberdayaan masyarakat?	Alhamdulillah yang dirasakan masyarakat merasa lebih berkembang aja desanya.
5.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi langsung mengenai pemberdayaan masyarakat ?	Masyarakat ikut akan tetapi ada juga yang tidak, sudah diajak tapi yaa tidak mau. Jadi tidak semua ikut berpartisipasi.
6.	Bagaimana realisasi pembangunan desa yang dirasakan ?	Untuk realisasinya sudah terlihat dengan perubahan desa

		yang tadinya kurang bagus sekarang menjadi lebih bagus lagi.
7.	Apakah masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah ?	Yaa diikut sertakan.
8.	Apakah pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik ?	Insyallah baik dan kami merasakannya. Semua terbagi rata jika ada pembagian mengenai dana desa.
9.	Apakah pemerintah desa telah transparan dalam penggunaan dana desa?	Untuk transparan sudah jelas.
10.	Bagaimana perubahan desa setelah adanya pemberdayaan ?	Perubahannya sangat bagus.

Wawancara dengan Warga Desa Sajiramekar (Bapak Komarudin)



Hasil Wawancara

Nama : Komarudin

Jabata : Masyarakat Desa Sajira

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Komarudin

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah masyarakat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat?	Sebenarnya ada yang merasakan dan ada yang tidak.
2.	Apakah masyarakat terlibat langsung dengan proses perencanaan penggunaan dana desa ?	Untuk terlibat yaa semuanya terlibat jadi seperti ada perwakilan yang selalu ikut musyawarah bareng.
3.	Apakah pemerintah desa telah jujur dalam penggunaan dana desa?	Untuk itu saya kurang tahu akan tetapi yang saya liat sudah jujur.
4.	Apa yang dirasakan setelah adanya pemberdayaan masyarakat?	Banyak sekali contohnya pembangunan yg amat terasa.
5.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi langsung mengenai pemberdayaan masyarakat ?	Masyarakat ikut berpartisipasi.
6.	Bagaimana realisasi pembangunan	Untuk realisasi sudah jelas

	desa yang dirasakan ?	dirasakan.
7.	Apakah masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah ?	Iya akan tetapi hanya perwakilan saja.
8.	Apakah pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik ?	Alhamdulillah baik.
9.	Apakah pemerintah desa telah transparan dalam penggunaan dana desa?	Sudah akan tetapi kurang maksimal karena tidak diumumkan kepada semua warga.
10.	Bagaimana perubahan desa setelah adanya pemberdayaan ?	Perubahannya sudah bagus.

Hasil Wawancara

Nama : Ustad Ume

Jabatan : Masyarakat desa

Tempat wawancara : Kediaman Ustad Ume

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah masyarakat merasakan adanya pemberdayaan masyarakat?	Masyarakat sangat merasakan perubahannya, pemberdayaan masyarakat sangatlah mulai berkembang sekarang ini, alhamdulillah dapat kepala desa nya yang amanah.
2.	Apakah masyarakat terlibat langsung dengan proses perencanaan penggunaan dana desa ?	Yaa terlibat langsung.
3.	Apakah pemerintah desa telah jujur dalam penggunaan dana desa?	Inshaallah pada jujur bagaimana sifat seseorangnya.
4.	Apa yang dirasakan setelah adanya pemberdayaan masyarakat?	Banyak sekali.
5.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi langsung mengenai pemberdayaan masyarakat ?	Untuk realisasi alhamdulillah apa yang disrankan warga dilakukan atau direalisasikan oleh pemerintah desa.
6.	Bagaimana realisasi pembangunan desa yang dirasakan ?	
7.	Apakah masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah ?	Iya diikutsertakan disetiap acara yang berhubungan dengan pengelolaan dan perencanaan desa untuk lebih baik lagi.
8.	Apakah pemerintah desa menjalankan	Alhamdulillah dengan baik

	tugasnya dengan baik ?	yang saya tahu, karena pemerintah desa yang sekarang pada ramah dan cekatan dalam membantu warga.
9.	Apakah pemerintah desa telah transparan dalam penggunaan dana desa?	Yaa sudah akan tetapi usul atau saran dari saya pampanglah dengan jelas misalnya di pos, atau pasang banner di lingkungan agar masyarakat mengetahui anggaran jangan pas musyawarah saja.
10.	Bagaimana perubahan desa setelah adanya pemberdayaan ?	Perubahan desa sangatlah terasa mulai dari jalan rusak sekarang bagus, pendidikan mulai berkembang, kesehatan mulai terjaga juga.

Lampiran 3

Realisasi pembangunan Rabat Beton





Pembangunan Drainase Kp. Sajira Timur



Pembangunan Gapura atau Batas Jalan



Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok



Pembangunan Sarana Olahraga



Pembangunan Perpustakaan Desa



Lampiran 4

Pemberdayaan dibidang pendidikan

Kegiatan di Perpustakaan Desa Sajiramekar





(Pemberdayaan dalam bidang Pendidikan)

Pengadaan Bangunan Pendidikan Usia Dini (PAUD)



Lampiran 5

Pemberdayaan dibidang kesehatan

Kegiatan Di Posyandu



Lampiran 6

Musyawarah Desa



(Pemberdayaan dalam Bidang Keagamaan)

Lampiran 7

Perangkat Desa Sajiramekar



Kantor desa Sajiramekar

